

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. DAHRI SALEH, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dr. H. ANWAR HAFID; M.Si

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. DAHRI SALEH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 198803 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kebebasan, berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat	Nilai Aspek Kebebasan	88,75
2	Meningkatnya Kesenjangan, Partisipasi, akses warga miskin dan menurunnya anti monopoli	Nilai Aspek Kesenjangan	78,00
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Demokrasi	Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	78,50

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.096.070.801,46	APBD
2 Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	1.071.618.450,00	APBD
3 Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.231.625.350,00	APBD
4 Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.191.000.100,00	APBD
5 Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	577.990.200,00	APBD
6 Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	72.009.450,00	APBD

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Drs. DAHRI SALEH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 198803 1 017



**PERJANJIAN KINERJA 100 HARI KERJA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mendorong dan mewujudkan Program Prioritas 9 Berani Gubernur Sulawesi Tengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam 100 hari kerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. DAHRI SALEH, M.Si
NIP : 19660311 198803 1 017
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si.
Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji :

1. Menyediakan data dan informasi sektoral yang terintegrasi dengan Command Center BERANI SAMPOROA, dengan prioritas keamanan, privasi, dan format terstandar.
2. Menjamin keamanan informasi dengan tidak memberikan data kepada PIHAK LAIN tanpa izin dan persetujuan tertulis dari pimpinan, segala bentuk penyalahgunaan atau kebijakan data akibat kelalaian, bersedia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Jumlah data Sektoral sbb : 1. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Terdaftar 2. Partai Politik dan Bantuan Keuangan Partai Politik	Data Sektoral	2
2	Persentase data Sektoral Bidang Perencanaan yang terintegrasi dengan <i>Command Center</i>	%	100%

3. Melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menciptakan inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan mendorong daya saing daerah.
4. Pemenuhan dokumen inovasi daerah Inovasi sesuai dengan syarat indikator Indeks Inovasi Daerah.
5. Keterlibatan stakeholder inovasi daerah antara lain pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, komunitas, media masa dan publik figur.
6. Mendaftarkan dan melaporkan inovasi daerah melalui aplikasi Innovative goverment award (IGA) yang difasilitasi oleh Badan Riset Inovasi Daerah Sulawesi Tengah selaku admin pemerintah daerah.
7. Mendaftarkan inovasi ke Badan Riset Inovasi Daerah Sulawesi Tengah.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Jumlah Inovasi yang tersedia dalam 100 Hari Kerja	Inovasi	2

8. Menyiapkan sistem informasi digital untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah yang terintegrasi dengan command center yaitu :
 - a. Sistem Informasi Peta Sebaran 9 Berani (SI BERANI)
 - b. Pusat Data Dan Informasi Kesbangpol (PADI)
9. Mendaftarkan sistem informasi digital ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Daerah Sulawesi Tengah.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Jumlah Aplikasi yang disiapkan dan terintegrasi dengan <i>Command center</i>	Aplikasi	2

PIhak kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si.

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. DAHRI SALEH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 198803 1 017

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Rachman Ansyari, M.Pd**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Dahri Saleh, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

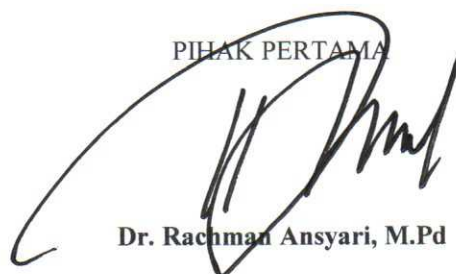
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA,

Drs. Dahri Saleh, M.Si

PIHAK PERTAMA

Dr. Rachman Ansyari, M.Pd

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/keg/sub.keg	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	60	Renstra/Cascading
	Sasaran Kegiatan			
	1. Meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	60%	Renstra/Cascading
	2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	- Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	60	Renstra/Cascading
	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	60	Renstra/Cascading
	4. Meningkatkan pemeliharaan barang milik daerah	- Persentase barang milik daerah yang dipelihara	60%	Renstra/Cascading

PROGRAM/KEG/SUB.KEG	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.096.070.801,46	APBD
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.621.388.958,46	
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 105.494.660,00	
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 133.069.683,00	
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 236.117.500,00	

Palu, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Des. Dahri Saleh, M.Si

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Rachman Ansyari, M.Pd

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Kristo Suryanto Tumakaka, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Dahri Saleh, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

Drs. Dahri Saleh, M.Si

Palu, 23 Februari 2026

PIHAK PERTAMA

Kristo Suryanto Tumakaka, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG POLITIK

	Sasaran Program/Keg/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	65%	Renstra/Cascading
	<i>Sasaran Kegiatan</i> - Meningkatkan pemahaman politik masyarakat	- persentase meningkatnya pemahaman politik bagi parpol	65%	Renstra/Cascading
	<i>Sasaran Sub. Kegiatan</i> - Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Renstra
	- Tersalurkannya hibah bantuan keuangan partai politik	- Jumlah partai politik penerima bantuan Keuangan	12 parpol	Cascading
	- Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang	Renstra
	- Tersosialisasinya Pendidikan Politik Bagi Perempuan	- Jumlah peserta Perwakilan Perempuan dari Partai Politik, LSD, Media, Mahasiswa, Panguyuban, dan Ormas	100 orang	Cascading
	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 laporan	Renstra

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 2.231.625.350	APBD
1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik.	Rp. 2.231.625.350	
Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Sub. Kegiatan Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 1.971.951.600	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 255.461.750	
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 4.212.000	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAERAH POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. Dahri Saleh, M.Si

Palu, 23 Februari 2026
KEPALA BIDANG POLITIK



Kristo Suryanto Tumakaka, S.Sos

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Irwan Duwila , S, SOS**
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Dahri Saleh, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

Drs. Dahri Saleh, M.Si

Palu, 23 Februari 2026
PIHAK PERTAMA

Irwan Duwila , S, Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

No	Sasaran Program/Kep/Suh/Keg	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Cakupan Pengustan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	65%	Renstra/Cascading
	<i>Sasaran Kegiatan</i> - Meningkatkan kualitas pemahaman ideologi dan wawasan	- Persentase SMA/SMK, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kepertahanan yang terbuai ideologi dan wawasan	45%	Renstra/Cascading
	<i>Sasaran Sub Kegiatan</i> - Terlaksananya pengusutan pusakibaka Terseleenggaranya Pengusutan Pusakibaka (Pengusutan Hari-Hari Besar Nasional)	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Pusakibaka - Jumlah Pelajar di wilayah Sulawesi Tengah yang menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada Peringatan hari-hari besar Nasional	1 Dokumen 71 orang	Renstra Cascading
	- Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka - Tertatibnya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Jumlah Pusakibaka - Jumlah Pelajar di wilayah Sulawesi Tengah yang menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan melalui proses Seleksi Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi	71 orang 71 orang	Renstra Cascading

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Rp. 1.071.618.450 (MHD)

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Penunpupan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Rp. 1.071.618.450

- Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Pusakibaka

Rp. 880.08.50

- Sub Kegiatan Pembentukan Pusakibaka

Rp. 983.599.800



Pala, 29 Februari 2026
 KEPALA BIDANG IDEOLOGI
 DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Irwani Dwiarta, S, SOS

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG KEWASPADAAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Warham Lumbengi, SE., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Dahri Saleh, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA
Drs. Dahri Saleh, M.Si

Palu, 23 Februari 2026
PIHAK PERTAMA

Warham Lumbengi, SE., MM

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Keg/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
I	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	84%	Renstra/Cascading
	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya kualitas pembinaan Stakeholder dalam kewaspadaan pencegahan konflik sosial daerah	Persentase pembinaan Stakeholder dalam kewaspadaan pencegahan konflik sosial daerah	84%	Renstra/Cascading
	<i>Sasaran Sub.Kegiatan</i> - Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	Renstra
	- Rapat Rencana Aksi Daerah TIM terpadu Penanganan Konflik Sosial	- Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah TIM terpadu Penanganan Konflik Sosial	1 Laporan	Cascading
	- Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40 orang	Renstra
	- Tersusunnya Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	- Jumlah rekomendasi pemantauan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial	40 Orang	Cascading

	- Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	75 orang	Renstra
	- Tersosialisasinya peningkatan kewaspadaan di wilayah perbatasan bagi aparat, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda	- Jumlah aparat dan aparat keamanan serta para tokoh yang mengikuti rapat sosialisasi peningkatan kewaspadaan di wilayah perbatasan	75 orang	Cascading
	- Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 dokumen	Renstra
	- Terfasilitasinya Rapat Forum Koordinasi Pimpinan daerah provinsi (Forkopimda)	- Jumlah laporan Fasilitas pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan daerah provinsi (Forkopimda)	4 laporan	Cascading

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

I Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.191.000.100
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.191.000.100
- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp. 60.326.600
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 3.517.750
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp. 80.395.950
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rp. 1.046.759.800



Palu, 23 Februari 2026
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN



Warham Lumbengi, SE., MM

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN
KEMASYARAKATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Ir. Fahrudin , ST., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Dahri Saleh, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Drs. Dahri Saleh, M.Si

Palu, 23 Februari 2026
PIHAK PERTAMA

Dr. Ir. Fahrudin , ST., M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

No	Sasaran Program/Keg/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	65%	Renstra/Cascading
	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terbina	65%	Renstra/Cascading
	<i>Sasaran Sub. Kegiatan</i> - Tersusunnya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dokumen	Renstra
	- Terpenuhiya Kebutuhan pendanaan organisasi masyarakat ormas	- Jumlah ormas penerima dana hibah	3 ormas	Cascading
	- Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 orang	Renstra
	- Terbimbingnya ORMAS dalam pemenuhan legalitas	- Jumlah ormas yang dilegalitaskan	20 ormas	Cascading
II	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	65%	Renstra/Cascading
	<i>Sasaran Kegiatan</i> - Meningkatkan kualitas pembinaan Masyarakat di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	- Persentase masyarakat yang terbina ketahanan ekonomi, sosial & Budaya	65%	Renstra/Cascading
	<i>Sasaran Sub. Kegiatan</i> - Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	220 org	Renstra
	- Tersosialisasinya Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya bagi masyarakat	- Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 org	Cascading

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

I Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 577.990.200
1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 577.990.200
- Sub. Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Rp. 500.000.000

- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Rp. 77.990.200

II Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Rp. 72.009.450

APBD

- 2 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Rp. 72.009.450

- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah.

Rp. 72.009.450

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. Dahri Saleh, M.Si

Palu, 23 Februari 2026

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

Dr. Ir. Fahrudin , ST., M.Si

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Moh. Arief Rakhman, SE., M.Si**

Jabatan : **Ka. Sub. Bagian Keuangan dan Asset**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Rachman Ansyari, M.Pd**

Jabatan : **Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 Februari 2024



PIHAK KEDUA

Dr. Rachman Ansyari, M.Pd

PIHAK PERTAMA

Moh. Arief Rakhman, SE., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

No	Sasaran Kegiatan/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Keg : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN - Terdistribusinya pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah ASN yang Terdistribusi Gaji, Tunjangan dan TPP	45 orang 45 orang	Renstra Cascading
	- Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Tersusunnya Laporan Keuangan.	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 Laporan 1 Laporan	Renstra Cascading

SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.620.892.658,46	APBD
2 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 496.300	

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Bachman Ansyari, M.Pd

Palu , 23 Februari 2026
PIHAK PERTAMA
KA.SUB.BAG KEUANGAN DAN ASSET
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG

Moh. Arief Rakuman, SE., M.Si

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Erni, SH, M.A.P**
Jabatan : **Ka. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Rachman Ansyari, M.Pd**
Jabatan : **Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA



Dr. Rachman Ansyari, M.Pd

PIHAK PERTAMA



Erni, SH, M.A.P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

No	Sasaran Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Renstra/Cascading
	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Renstra/Cascading
	- Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	Renstra/Cascading
	- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Renstra/Cascading
	Keg : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Renstra
	- Tersedianya layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 unit	Cascading
	- Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	Renstra
	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	1 paket	Cascading
	Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	Renstra
	- Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	Cascading

SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 7.093.860	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 21.590.800	
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 29.480.000	
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 47.330.000	
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 93.860.000	

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 39.209.683
- Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 236.117.500

Palu, 23 Februari 2026

**PIHAK KEDUA**
SEKRETARIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN SULAWESI TENGAH
Rachman Ansyari, M.Pd

PIHAK PERTAMA
KA.SUB.BAG KEPEGAWAIAN
DAN UMUM BAKESBANGPOL
PROV. SULTENG

Erni SH, M.A.P